

ABSTRAK

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sudah mempunyai legitimasi secara yuridis formal yang didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan perda dan peraturan peraturan peraturan lainnya untuk melaksanakan keberlangsungan tugas otonomi dan tugas pembantuan”. DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan yang sebagaimana diharapkan. Oleh karna itu perlu adanya peningkatan fungsi legislasi yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup studi kepustakaan, kajian dokumenter dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan melalui studi pustaka (*library research*) dan dilengkapi dengan wawancara sebagai data pelengkap data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tangerang adalah perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program legislasi daerah, pengesahan oleh kepala daerah dan ditanda tangani paling lama 30 hari. Kendala yang menghambat tahapan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang yaitu tertera di dalam hambatan yuridis, teknis, dan eksternal.

Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pembentukan Perda, DPRD, Kabupaten Tangerang

ABSTRACT

The implementation of the legislative function of the DPRD in the formation of regional regulations already has formal juridical legitimacy based on Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "The regional government has the right to stipulate regional regulations and other regulations to carry out the continuity of the tasks of autonomy and assistance tasks". DPRD as a community representative institution in fighting for community aspirations has not fully played the role as expected. Therefore, it is necessary to increase the function of legislation which is more in favor of the interests of the wider community. The approach method used in writing this law is normative juridical and the research specification used is analytical descriptive. The data used is secondary data which includes literature studies, documentary studies conducted on primary, secondary, and tertiary legal materials. The method used is through library research and supplemented by interviews as secondary data complementary data. The data analysis method used is a qualitative analysis method. The results of this study indicate that the stages of implementing the DPRD function in forming regional regulations in Tangerang Regency are the planning for drafting regional regulations carried out in the regional legislation program, ratification by the Regional Head and signed for a maximum of 30 days. Constraints that hinder the stages of implementing the functions of the Tangerang Regency DPRD namely stated in the juridical, technical, and external barrie.

Keywords: Implementation of Legislative Functions, Formation of Regional Regulations, DPRD, Tangerang Regency